

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi diarahkan pada upaya untuk mewujudkan perekonomian negara yang mandiri, dan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia secara adil dan merata. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan bangsa Indonesia. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, masalah pembiayaan menjadi sangat vital. Salah satu sumber dana terbesar untuk membiayai pembangunan tersebut berasal dari penerimaan pajak, Dalam hal ini termasuk juga untuk pembiayaan pemerintah daerah. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh masyarakat daerah. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah, dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah tersebut. Undang-undang tentang Pemerintahan daerah menetapkan pajak daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, Dalam APBN pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri misalnya pinjaman luar negeri dan hibah, sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan non migas serta pajak. Untuk menjadi bangsa yang mandiri, pemerintah terus mengoptimalkan sumber penerimaan negara dalam negeri. Pajak

merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri. Hal ini nampak dari terus meningkatnya proporsi penerimaan pajak terhadap total APBN. Penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan yang besar bila dibandingkan dengan penerimaan yang berasal dari sumber daya alam yang mempunyai umur relatif terbatas yang suatu saat akan habis karena selalu dipergunakan dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka semakin bertambah pula subyek dan obyek pajaknya. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, diharapkan semakin besar pula penerimaan yang berasal dari sektor pajak. Salah satu potensi pajak yang besar itu adalah wajib pajak orang pribadi.

Tetapi pada kenyataan masih banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan SPT tahunan mereka. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar setiap tahunnya tetapi tidak semua wajib pajak tersebut melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa kontribusi pembayaran pajak yang dihimpun oleh pemerintah adalah untuk kepentingan bersama. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Dan hal ini semua dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jadi, wajib pajak perlu menyadari mengenai fungsi dan peranan dari pajak. Dengan demikian, diharapkan akan menimbulkan kesadaran terhadap kepatuhan pajak. Dalam rangka meningkatkan penerimaan

pendapatan negara dari sektor pajak, pemerintah mengeluarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan merubah sistem perpajakan yang digunakan yaitu dengan menggunakan sistem self assessment system, dimana wajib pajak berkewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraannya. Selain dengan sistem self assessment system yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak dalam pelaporannya, adanya sanksi juga diharapkan agar wajib pajak patuh terhadap kewajiban mereka. Dalam peraturan perpajakan sanksi juga diberikan kepada wajib pajak yang dalam hal ini wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga kepada wajib pajak yang lalai terhadap kepatuhan perpajakannya. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi yang tegas diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, peranan pengawasan pajak juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan proses pengawasan yang dilakukan melalui prosedur pemeriksaan. Dengan adanya pemeriksaan pajak, diharapkan dapat memberikan motivasi positif kepada wajib pajak agar lebih meningkatkan kepatuhan perpajakannya dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimasa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. Pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak, dalam penelitian ini peneliti mengambil objek pada CV. Makmur Agro Sidoarjo,

karena sesuai observasi yang dilakukan peneliti para karyawan masih banyak yang belum memahami fungsi pajak dan sanksi pajak itu sendiri, sesuai dengan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul **Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak, Sanksi dan Pengawasan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak CV. Makmur Agro Sidoarjo.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi dan dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemahaman Fungsi Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak CV. Makmur Agro Sidoarjo?
2. Apakah pemahaman Sanksi pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak CV. Makmur Agro Sidoarjo?
3. Apakah Pemahaman Pengawasan Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak CV. Makmur Agro Sidoarjo?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak CV. Makmur Agro Sidoarjo
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak CV. Makmur Agro Sidoarjo

3. Untuk mengetahui Pemahaman Pengawasan Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak CV. Makmur Agro Sidoarjo

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Selain sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Jurusan Akuntansi fakultas Ekonomi STIE Mahardhika Surabaya, diharapkan penelitian ini juga bermanfaat bagi :

1. Aspek Akademis

Penelitian ini akan memberikan suatu gambaran yang jelas akan Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak, Sanksi dan Pengawasan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga perusahaan dapat melakukan evaluasi diri dan mengambil tindakan yang perlu untuk membenahi Kepatuhan Wajib Pajak bagi karyawan.

2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Khususnya dalam bidang pengetahuan pajak, penelitian ini akan menambah perbendaharaan karya ilmiah, khususnya mengenai Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak, Sanksi dan Pengawasan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan harapan akan bermanfaat sebagai bahan masukan berupa studi kasus yang dapat dipelajari dan dipahami

3. Aspek Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian ataupun studi komparatif dalam mengevaluasi Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak, Sanksi dan Pengawasan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Melalui penelitian ini diharapkan pembaca dapat memperoleh masukan yang berarti dalam mengimplementasikan masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi.